



WALI KOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO

NOMOR ... TAHUN 2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO DAN
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, terdapat 15 (lima belas) Perangkat Daerah yang mengalami perubahan dan perlu dilakukan penyesuaian kembali tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Probolinggo dan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu diatur kembali dalam Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 219 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Probolinggo dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
2. Daerah adalah Kota Probolinggo.
3. Perangkat Daerah yang adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
5. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
6. Pemantauan kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan informasi yang meliputi :
 - a. hasil pengukuran kinerja; dan
 - b. identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
7. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.
8. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
9. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penetapan indikator kinerja utama adalah untuk memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi.

Pasal 3

Tujuan penetapan indikator kinerja utama adalah untuk mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat peraturan ini berlaku, maka Peraturan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 219 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Probolinggo dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dan perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 2024

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,
M. TAUFIK KURNIAWAN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO DAN PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi : Pemerintah Kota Probolinggo

- Tujuan : 1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah
2. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia
3. Menurunkan Kemiskinan dan Ketimpangan
4. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
5. Mewujudkan Pemerintah yang Adaptif serta Pelayanan Publik Prima berbasis Digital

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	URUSAN PENGAMPU
1	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah	1. Pertumbuhan Ekonomi	$\frac{PDRB_{(t)} - PDRB_{(t-1)}}{PDRB_{(t-1)}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>t = tahun pengamatan (tahun ini) t-1 = satu tahun sebelumnya</p>	Penanaman Modal Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Pariwisata Pertanian Perikanan Pangan
2	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	<p>Sebuah indikator kesejahteraan yang dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pengeluaran. Rumus penghitungan IPM sebagai berikut.</p> $IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pengeluaran}}$	
3	Menurunkan Kemiskinan dan Ketimpangan	3. Persentase Penduduk Miskin	<p>Persentase jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan dibagi dengan jumlah total penduduk.</p> $P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$	

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	URUSAN PENGAMPU
		<p>4. Tingkat Pengangguran Terbuka</p> <p>5. Indeks Gini</p>	<p>Keterangan :</p> <p>a = 0 z = garis kemiskinan. yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3,, q), yi < z q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk.</p> $TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran} \times 100\%}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}$ <p>Keterangan :</p> <p>TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja</p> $GR = 1 - \frac{\sum f_i Y_i + Y_{i-1} }{\sum f_i Y_i}$ <p>Keterangan :</p> <p>fi = jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i. Yi = jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke i. Nilai GR terletak antara nol sampai dengan satu. Bila GR = 0, ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya. Bila GR = 1 artinya ketimpangan pendapatan timpang</p>	Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	URUSAN PENGAMPU
			sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja	
4	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	6. Indeks Infrastruktur	<p>Indeks Infrastruktur dihitung dengan menggunakan rata-rata aritmatik dari Indeks Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur, yakni sebagai berikut:</p> $\text{Indeks Infrastruktur} = \frac{\text{Indeks Ketersediaan} + \text{Indeks Kualitas}}{2}$ <p>Keterangan : <i>Indeks Ketersediaan meliputi :</i> (Fasilitas Jalan, Angkutan, Air Limbah, Irigasi drainase, Komunikasi informatika, fasilitas publik, IMB) <i>Indeks Kualitas meliputi :</i> (Jaringan Jalan, Air Bersih, Irigasi drainase, Persampahan, Pertanahan)</p>	<p>Pekerjaan Umum</p> <p>Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> <p>Pertanahan</p> <p>Perhubungan</p>
		7. Persentase Penurunan Emisi GRK	<p>Persentase Penurunan Emisi GRK = Persentase PEy-1 (+) Persentase PEy</p> $\text{Persentase PEy} = \frac{PEy}{EBy} \times 100\%$ $PEy = EBy - EPy$	<p>Lingkungan Hidup</p> <p>Trantibum Sub Bencana</p>

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	URUSAN PENGAMPU
			<p>Keterangan :</p> <p>PEy = Penurunan emisi oleh aksi mitigasi pada tahun y (ton CO2)</p> <p>EBy = Emisi Baseline pada tahun y (ton CO2)</p> <p>EPy = Emisi Aksi Mitigasi pada tahun y (ton CO2)</p>	
5	Mewujudkan Pemerintah yang Adaptif serta Pelayanan Publik Prima berbasis Digital	8. Indeks Reformasi Birokrasi	<p>Indeks RB = Nilai RB General+Nilai RB Tematik</p> <p>Keterangan :</p> <p>Reformasi birokrasi merupakan upaya memastikan tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penataan, percepatan, dan inovasi di berbagai area. Terdapat dua dimensi dalam Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi, yaitu dimensi RB General dan dimensi RB Tematik. Evaluasi pada RB General lebih memotret kemajuan reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah berdasarkan pada upaya memperbaiki masalah hulu atau masalah-masalah umum yang terjadi di internal birokrasi dan terkadang dampaknya bersifat jangka menengah sampai panjang. Adapun Evaluasi RB Tematik lebih menekankan pada upaya yang bersifat</p>	Unsur Staff (Setda) Perencanaan Seluruh perangkat daerah Kearsipan Keuangan Pengawasan Komunikasi dan Informatika Statistika Persandian Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Unsur Kewilayahannya

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	URUSAN PENGAMPU
			terobosan atau inovasi dalam mengatasi berbagai masalah tata kelola yang terjadi pada tema-tema prioritas pembangunan	Penanaman Modal
				Kesehatan
				Unsur Staff

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Sekretariat Daerah
Tujuan	: 1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif 2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Integrasi TIK
Indikator Tujuan	: 1. Nilai SAKIP 2. Indeks Pelayanan Publik
Tugas	: Membantu Wali Kota dalam Penyusunan Kebijakan dan Pengordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah : Serta Pelayanan Administratif
Fungsi	: 1. Pengordinasian Penyusunan Kebijakan Daerah 2. Pengordinasian Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah 3. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah 4. Pelayanan Administratif dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Daerah 5. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang difasilitasi sesuai ketentuan	<u>Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang difasilitasi</u> x100 Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan sesuai ketentuan	Laporan fasilitasi kebijakan bidang perekonomian	Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	$ITKP = \frac{(W_{Transparansi} \times IK_{Transparasi}) + (W_{Efisiensi} \times IK_{Efisiensi}) + (W_{Akuntabilitas} \times IK_{Akuntabilitas}) + (W_{Partisipasi} \times IK_{Partisipasi}) + (W_{Kualitas Hasil} \times IK_{Kualitas Hasil})}{W_{total}}$ <p>Dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $IK_{Transparasi}$: Indeks Transparansi Pengadaan (ketersediaan informasi pengadaan untuk publik). • $IK_{Efisiensi}$: Indeks Efisiensi Pengadaan (waktu, biaya, dan sumber daya yang digunakan dalam pengadaan). • $IK_{Akuntabilitas}$: Indeks Akuntabilitas Pengadaan (kepatuhan terhadap aturan, pengawasan, dan audit). • $IK_{Partisipasi}$: Indeks Partisipasi (tingkat keterlibatan pihak terkait dalam proses pengadaan, baik dari sektor publik maupun swasta). • $IK_{Kualitas Hasil}$: Indeks Kualitas Hasil (kualitas barang/jasa yang dihasilkan melalui proses pengadaan). • $W_{Transparansi}, W_{Efisiensi}, W_{Akuntabilitas}, W_{Partisipasi}, W_{Kualitas Hasil}$: Bobot masing-masing dimensi, yang disesuaikan dengan prioritas atau kebijakan pengadaan. • W_{total}: Total bobot seluruh dimensi, biasanya $W_{total} = 1.0$. 	Website SIRUP/SIUKP BJ	Kepala Bagian PBJ
		Nilai LPPD	Nilai LPPD Keterangan : Hasil Evaluasi atas laporan penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja	Keputusan Mendagri tentang Hasil Evaluasi LPPD	Kepala Bagian Pemerintahan

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat		
	Persentase Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi sesuai ketentuan		<u>Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi</u> $\times 100$ Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat sesuai ketentuan	Laporan fasilitasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
	Indeks Reformasi Hukum		Indek Reformasi Hukum Keterangan : Hasil instrumen pengukuran reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional	Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Hasil Penilaian IRH	Kepala Bagian Hukum
	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Sekretariat Daerah		Nilai SAKIP Keterangan : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Perangkat Daerah terhadap Sekretariat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Kepala Bagian Umum Kepala Bagian Organisasi

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat Daerah	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat</p> <p>Keterangan : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kota Probolinggo Terhadap Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo</p>	Laporan Hasil SKM Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Umum Kepala Bagian Prokopim

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik berbasis integrasi TIK

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif

Indikator : Indeks Pelayanan Publik

Tujuan Nilai SAKIP

- Tugas : Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan
- Fungsi : 1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
 4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Peran DPRD sesuai dengan Fungsinya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat Keterangan : Hasil Survey Kepuasan anggota DPRD Kota Probolinggo Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Probolinggo	Laporan SKM	Sekretaris DPRD

2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada	Nilai SAKIP pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris DPRD
---	---	--	--	-----------------

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Tujuan : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif

Indikator

Tujuan : 1. Nilai SAKIP

2. Indeks Inovasi Daerah

Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah

Fungsi : 1. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan melalui peningkatan kualitas dokumen	Persentase PD yang menyusun dokumen perencanaan berkualitas baik	<p>Jumlah PD dengan dokumen kualitas baik</p> <hr/> <p style="text-align: right;">x 100</p> <p>Jumlah semua PD</p> <p>Kriteria berkualitas baik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra selaras dengan RPJMD 2. Renja n+1 selaras dengan RKPD n+1 3. Renja P-APBD selaras dengan RKPD Perubahan 	Laporan Monev	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah ; 2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 3. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 4. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya.
2	Meningkatnya Kualitas Riset	Persentase hasil riset yang dimanfaatkan dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	<p>Jumlah hasil riset (Laporan Akhir, Jurnal, dan Policy Brief) yang dimanfaatkan dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah)</p> <hr/> <p style="text-align: right;">x100%</p> <p>Jumlah Total Hasil Riset</p>	Dokumen hasil riset, policy brief, dan jurnal	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah
		Persentase hasil riset yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah	<p>Jumlah Hasil Riset yang Dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah</p> <hr/> <p style="text-align: right;">x100%</p> <p>Jumlah Total Hasil Riset</p>	Dokumen hasil riset dan jurnal ilmiah	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah

3.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas inovasi daerah	Presentase Nilai Inovasi Daerah yang matang	$\frac{\text{Total Inovasi Daerah yang Matang}}{\text{Jumlah Total Inovasi Daerah}} \times 100\%$ <p>Keterangan: Inovasi Daerah yang matang adalah skor kematangan diatas ≥ 70</p>	SK Kemendagri mengenai Indeks Inovasi Daerah	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah
4.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Bappedalitbang	Nilai SAKIP pada Bappedalitbang	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Badan Pendapatan , Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Probolinggo
Tujuan	: Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif
Indikator Tujuan	: Opini BPK terhadap LKPD
Tugas	: Membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Keuangan.
Fungsi	<ol style="list-style-type: none">: 1. Perumusan kebijakan Daerah di bidang Keuangan2. Pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Keuangan3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Daerah di bidang Keuangan4. Pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang Keuangan; dan5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota.

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	$\frac{PAD \text{ Tahun (n)} - PAD \text{ Tahun (n-1)}}{PAD \text{ (n)}} \times 100\%$ <p>Keterangan</p> <p>a PAD Tahun (n) = Pendapatan Asli Daerah Tahun berjalan</p> <p>b PAD Tahun (n-1) = Pendapatan Asli Daerah Tahun sebelumnya</p> <p>* Menggunakan realisasi PAD</p>	LRA	Kabid Pendapatan Kabid PBB BPHTB
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Persentase PD dengan Realisasi di atas 90%	$\frac{Jumlah PD dengan Realisasi Belanja diatas 90\%}{Jumlah PD} \times 100\%$	LRA	Kabid Anggaran Kabid Perben dan Kasda
3.		Persentase PD dengan LKPD yang sesuai ketentuan	$\frac{Jumlah PD yang LKPD nya sesuai ketentuan}{Jumlah PD} \times 100\%$	LK SKPD	Kabid Akuntansi dan Pelaporan

			<p>Keterangan</p> <p>* Yang dimaksud LKPD sesuai ketentuan adalah LKPD telah sesuai dengan PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Kebijakan Akuntansi</p>		
4.		Persentase PD yang memiliki kevalidan data BMD	<p>$\frac{\text{Jumlah PD yang memiliki kevalidan data BMD}}{\text{Jumlah PD}} \times 100\%$</p> <p>Keterangan :</p> <p>* Yang dimaksud PD yang memiliki kevalidan data BMD adalah PD yg telah memiliki kesamaan data dengan melaksanakan Rekonsiliasi (antara realisasi LRA dengan Pencatatan BMD)</p>	BA Rekon Data BMD Tahun berjalan	Kabid BMD
5	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP pada BPPKAD	Nilai SAKIP pada BPPKAD	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Inspektorat Kota Probolinggo
Tujuan	: Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif
Indikator Tujuan	: Level Maturitas SPIP
Tugas	: membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah oleh Perangkat Daerah
Fungsi	: 1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; 2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; 3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; 4. penyusunan laporan hasil pengawasan; 5. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi; 6. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; 7. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan 8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsi

No	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Probolinggo	Persentase PD dengan hasil evaluasi kinerja minimal memuaskan	$\Sigma \text{ PD yang Memperoleh Nilai SAKIP Min A}$ $f(x) = \frac{\text{-----}}{\Sigma \text{ seluruh PD}} \times 100\%$	Dokumen laporan hasil evaluasi SAKIP	- Inspektur Pembantu I - Inspektur Pembantu II - Inspektur Pembantu III
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo	Persentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan	$\Sigma \text{ Temuan yang Ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi}$ $f(x) = \frac{\text{-----}}{\Sigma \text{ seluruh Temuan}} \times 100\%$	- LHP APIP internal dan external - Pemantauan TLHP	- Inspektur Pembantu I - Inspektur Pembantu II - Inspektur Pembantu III
		Persentase penanganan kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan	$\Sigma \text{ penanganan kasus/pengaduan masyarakat yang terselesaikan}$ $f(x) = \frac{\text{-----}}{\Sigma \text{ penanganan kasus / pengaduan masyarakat}} \times 100\%$	- Dokumen Pengaduan - Dokumen LHP Pengaduan/Kasus	Inspektur Pembantu IV
3.	Meningkatkan Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan Maturitas SPIP Level 3	$\Sigma \text{ PD dengan Maturitas SPIP Level 3}$ $f(x) = \frac{\text{-----}}{\Sigma \text{ seluruh PD}} \times 100\%$	Dokumen hasil penilaian maturitas SPIP	- Inspektur Pembantu I - Inspektur Pembantu II

					- Inspektur Pembantu III - Inspektur Pembantu IV
4	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Inspektorat	Nilai SAKIP pada Inpektorat	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo

Tujuan : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif

Indikator Tujuan : Indeks Sistem Merit

Tugas : Membantu Wali Kota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan Daerah di Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;
2. Pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Daerah di Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas Daerah di Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
5. Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/OUTCOM E	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas Aparatur	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_2 =$	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara • SIMPEG • SAPK 	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Formasi, Informasi dan Mutasi Pegawai • Bidang Pembinaan, Pengembangan dan

			$W_{2k} * R_{2k}$ $IP_3 =$ $W_{3l} * R_{3l}$ $IP_4 =$ $W_{4m} * R_{4m}$		Kesejahteraan Pegawai
			<p>Keterangan:</p> <p>IP= Indeks Profesionalisme</p> <p>IP_i= Indeks Profesionalisme ke-<i>i</i></p> <p>IP₁= Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi</p> <p>IP₂= Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi</p> <p>IP₃= Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja</p> <p>IP₄= Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin</p> <p>$W_{1j} * R_{1j} = \text{Bobot Indikator Kualifikasi ke-}j * \text{Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-}j$</p> <p>$W_{2k} * R_{2k} = \text{Bobot indikator Kualifikasi ke-}k * \text{Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-}k$</p> <p>$W_{3l} * R_{3l} = \text{Bobot indikator Kualifikasi ke-}l * \text{Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-}l$</p> <p>$W_{4m} * R_{4m} = \text{Bobot indikator Kualifikasi ke-}m * \text{Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-}m$</p>		
2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada BKPSDM	Nilai SAKIP pada BKPSDM	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Probolinggo
Tujuan	: Meningkatkan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
Indikator Tujuan	: Persentase penurunan kasus ketentraman dan ketertiban
Tugas	: Membantu Wali Kota dalam melaksanakan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah
Fungsi	<p>: perundang undangan</p> <p>1. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan</p> <p>2. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>3. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;</p>

5. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;
6. pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan/kantor kesatuan bangsa dan politik Kota;
7. pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya peran serta orkemas dan partisipasi politik masyarakat	Persentase Orkemas yang aktif	$\frac{\text{Jumlah orkemas yang aktif}}{\text{Jumlah total orkemas yang terdata}} \times 100\%$	Laporan hasil kegiatan	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
		Prosentase partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pemilihan Umum	$\frac{\text{Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya}}{\text{Jumlah keseluruhan pemilih}} \times 100\%$	Laporan Monev Pemilu	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
2.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila, serta mengantisipasi terjadinya konflik	Persentase Potensi Konflik Sosial Masyarakat yang terselesaikan	$\frac{\text{Potensi konflik sosial yang diselesaikan}}{\text{Potensi konflik sosial yang terjadi}} \times 100\%$	Laporan Tim Penanganan Konflik Sosial Kota Probolnggo	Bidang Kesatuan Bangsa

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	untuk menciptakan rasa tenram, tertib dan aman di masyarakat.				
3.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Bakesbangpol	Nilai SAKIP pada Bakesbangpol	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Instansi** : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota probolinggo
- Tujuan** : Meningkatnya Mitigasi, Adaptasi dan Ketahanan terhadap Bencana
- Indikator Tujuan** : Indeks Resiko Bencana
- Tugas** : 1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan, penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- Fungsi** : 1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah	<p>Rumus Umum Indeks Ketahanan Daerah (IKD):</p> $IKD = \frac{(W_{Bencana} \times IK_{Bencana}) + (W_{Ekonomi} \times IK_{Ekonomi}) + (W_{Sosial} \times IK_{Sosial}) + (W_{Lingkungan} \times IK_{Lingkungan})}{W_{total}}$	Surat Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur Perihal Penyampaian Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kab / Kota Provinsi Jawa Timur	1. Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan 2. Kasi Kedaruratan dan Logistik 3. Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada BPBD	Nilai SAKIP pada BPBD	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi : Satuan Polisi Pamong Praja

Tujuan : 1. Meningkatnya Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Umum; dan
2. Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana

Indikator Tujuan 1. Persentase Penurunan Kasus ketentraman dan Ketertiban
2. Indeks Resiko Bencana

Tugas : Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Fungsi : 1. Perumusan Kebijakan Daerah dibidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat
2. Pelaksanaan Kebijakan daerah di Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Daerah di Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat,
4. Pelaksanaan Administrasi di Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Probolinggo sesuai dengan tugas dan fungsinya

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	<input type="checkbox"/> Indeks N-1 x Tingkat pertumbuhan kasus trantibum + Indeks N-1	Laporan Kegiatan 1 data trantibum	Satpol PP
2.	Meningkatnya Penanganan Kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kabupaten/Kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di Kabupaten/Kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ----- x 100% Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota	Laporan Kegiatan 1 data damkar	Damkar
3.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Satpol PP	Nilai SAKIP pada Satuan Polisi Pamong Praja	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	:	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Tujuan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan Kualitas dan Akses Kesehatan;2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dan3. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif
Indikator Tujuan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Indeks Kesehatan;2. Indeks Kepuasan Masyarakat, dan3. Nilai SAKIP
Tugas	:	Membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
Fungsi	:	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan kebijakan Daerah di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana2. Pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Daerah di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana

4. Pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan

5. Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	Perhitungan dari BPS Keterangan : UHH adalah Umur Harapan Hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun	BPS	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kepala Bidang Kesmas, Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

2.	Meningkatnya Keluarga Berkualitas dan Pengendalian Penduduk yang Seimbang	Total Fertility Rate (TFR)	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ <p>Keterangan : Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) ASFR_i (Angka Kelahiran untuk perempuan pada kelompok umur <i>i</i>) i = 1 : Kelompok umur 20-24 tahun ,..... dan i = 7 untuk kelompok umur 45-49 tahun </p>	Laporan https://portalkpk.bkkbn.go.id/	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	(IKM RSUD dr. Mohammad Saleh + IKM RSUD Ar Rozy + IKM Puskesmas + IKM Laboratorium Kesehatan Daerah) <hr/> 4	Survei Kepuasan Masyarakat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, Direktur RSUD dr. Mohammad Saleh, Direktur RSUD Ar Rozy, Kepala 6 Puskesmas dan Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan
4.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Dinkes PPKB	Nilai SAKIP pada Dinkes PPKB	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Instansi : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Tujuan : 1. Meningkatnya cakupan perlindungan sosial masyarakat; dan
2. Meningkatnya keberdayaan dan kesetaraan gender
- Indikator Tujuan : 1. Persentase PMKS; dan
2. Indeks Pembangunan Gender
- Tugas : Membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
- Fungsi : 1. Perumusan kebijakan Daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
2. Pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
4. Pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak ; dan
5. Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	$\frac{\text{jumlah PMKS yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya}}{\text{Jumlah PMKS}} \times 100\%$		Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial
2.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	$\frac{\text{Jumlah Lembaga Kemasyarakatan kelurahan yang aktif}}{\text{Jumlah Seluruh Lembaga Kemasyarakatan kelurahan}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Kriteria Lembaga Aktif : a) Mempunyai ketetapan/ struktur organisasi; b) Mempunyai penanggung jawab; c) Terlaksananya program kegiatan (minimal 75 %).</p>	Laporan hasil fasilitasi Pembinaan	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Masyarakat
3.	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Peringkat Anugerah Parahita Ekapraya	Hasil Evaluasi Pengarustamaan Gender	Dokumen Hasil Evaluasi Pengarustamaan Gender oleh Kementerian PPPA	Bidang Pemberdayaan Perempuan
4.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	$\frac{\text{jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh UPTD PPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan}}{\text{jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan melalui UPTD PPA}} \times 100\%$	Data penanganan kasus UPTD PPA	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

	serta tumbuh kembang anak	yang ditangani sesuai dengan ketentuan			
			<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang sudah ditangani di Tahun n 2. Jumlah Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang menjadi tanggung jawab UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) untuk ditangani 		
	Peringkat Kota Layak Anak		Peringkat Hasil Penilaian Indikator Kota Layak Anak	Dokumen Penilaian Kota Layak Anak oleh Kementerian PPPA	Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak
5.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Dinsos PPPA	Hasil penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kota Probolinggo
Tujuan	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan2. Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah
Indikator Tujuan	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase Prestasi Olahraga dan Kepemudaan yang Dicapai2. Persentase kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD
Tugas	: Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata.
Fungsi	<ol style="list-style-type: none">1. perumusan kebijakan Daerah di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;2. pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Daerah di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;4. pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata; dan5. pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	
1.	Terwujudnya peningkatan Peran Pemuda dan Prestasi Olah Raga.	Persentase Prestasi Kepemudaan dan Olah Raga Yang Dicapai	$\frac{\sum \text{Prestasi Kepemudaan dan Cabang Olahraga Yang Diraih}}{\text{Seluruh Ajang Prestasi Kepemudaan dan Cabor Yang Diikuti}} \times 100\%$	X 100%	Laporan Data	Bidang Pemuda dan Olah Raga
2.	Terwujudnya peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara	Persentase Peningkatan Angka Kunjungan Wisatawan	$\frac{\sum \text{Angka Kunjungan Wisatawan Ke Kota Probolinggo pada tahun N} - \sum \text{Angka Kunjungan Wisatawan Ke Kota Probolinggo pada tahun N-1}}{\sum \text{Angka Kunjungan Wisatawan Ke Kota Probolinggo pada tahun N-1}} \times 100\%$	X 100%	Laporan Data	Bidang Destinasi Pariwisata dan Bidang Promosi Pariwisata
3.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Dispopar	Nilai SAKIP pada Dispopar	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris	

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tujuan	: Meningkatkan Pemenuhan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan dengan Penguatan Karakter Nilai-Nilai Budaya Daerah
Indikator	: Indeks Pendidikan
Tujuan	
Tugas	: Membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan
Fungsi	<ol style="list-style-type: none">: 1. Perumusan kebijakan Daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;2. Pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;4. Pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan; dan5. Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya pelayanan aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Indeks SPM Pendidikan	<p>Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x Bobot Mutu (20%) + Persentase pencapaian penerima layanan dasar x Bobot Penerima layanan (80%)</p> <p>Keterangan : perhitungan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 195/M/2023 Tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan Indekss Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan</p>	Dapodik, Rapor Pendidikan Daerah Kemendikbud Ristek	<p>Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar,</p> <p>Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal,</p> <p>Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan,</p> <p>Sekretaris</p>
2	Meningkatkan Daya Saing Kebudayaan Lokal	Persentase kebudayaan yang dikelola menjadi daya saing daerah	$\frac{\text{Jumlah Kebudayaan yang dikelola menjadi daya saing daerah}}{\text{Jumlah seluruh Kebudayaan Daerah}} \times 100$	Dapobud	<p>Kepala Bidang Kebudayaan</p>
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Disdikbud	Nilai SAKIP pada Disdikbud	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Instansi : Dinas Perhubungan
- Tujuan : Meningkatkan Pemerataan dan Pemantapan Infrastruktur Perkotaan dalam Bidang Perhubungan
- Indikator Tujuan : Prosentase Pemerataan Infrastruktur Perhubungan Berkualitas Baik
- Tugas : Membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Perhubungan
- Fungsi :
1. Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perhubungan
 2. Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Perhubungan
 3. Pelaksanaan Administrasi Dinas Daerah di Bidang Perhubungan
 4. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Daerah di Bidang Perhubungan
 5. Pelaksanaan Fungsi Dinas Lain Yang Diberikan Oleh Wali Kota Sesuai Dengan Tugas dan Fungsinya

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Persentase Sarana LLAJ yang Tersedia di Kota Probolinggo	$\frac{\sum \text{Ruas jalan kota yang terpenuhi Sarana LLAJ tahun (n)}}{\sum \text{Seluruh Ruas Jalan Kota}} \times 100\%$	Data Fasilitas LLAJ	Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan
		Prosentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Angkutan Jalan di Kota Probolinggo	$\frac{\sum \text{Pelanggaran tahun (n)} - \sum \text{Pelanggaran tahun (n-1)}}{\sum \text{Pelanggaran tahun (n-1)}} \times 100\%$	Rekapitulasi Laporan Hasil Operasi Gabungan Tipe B	Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan
2.	Meningkatnya Kualitas Sarana Transportasi Darat dan Laut yang Memenuhi Standar Keselamatan	Persentase Sarana Transportasi Darat yang memenuhi standar keselamatan	$\frac{\sum \text{Ruas Jalan Kota yang Terpenuhi Sarana Transportasi Elektrikal}}{\sum \text{Seluruh Ruas Jalan Kota}} \times 100\%$	Data Inventarisasi Perlengkapan Jalan	Bidang Pengembangan Transportasi
		Prosentase Angkutan Laut yang Memenuhi Standar Keselamatan	$\frac{\sum \text{Kapal <7GT yang memiliki Dokumen Kapal}}{\sum \text{Kapal <7GT yang tersedia}} \times 100\%$	Data Kapal Pengurusan Surat Ukur sip dibawah 7 GT	Bidang Pengembangan Transportasi

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
3.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Dishub	Nilai SAKIP pada Dishub	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	:	Dinas Komunikasi dan Informatika
Tujuan	:	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas
Indikator Tujuan	:	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
Tugas	:	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian
Fungsi	:	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan kebijakan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;4. Pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian; dan5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Sistem Elektronik yang terintegrasi	Persentase Sistem Elektronik yang terintegrasi	$f(x) = \frac{\sum \text{Sistem Elektronik yang terintegrasi}}{\sum \text{Sistem Elektronik}} \times 100\%$ <p><u>Penjelasan :</u> Sistem Elektronik</p>	Laporan Register Sistem Elektronik	Kepala Bidang Layanan e-Goverment dan Teknologi Informasi dan Komunikasi
2.	Meningkatnya keterbukaan informasi publik pada Badan Publik	Persentase Badan Publik yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik	$f(x) = \frac{\sum \text{Badan Publik yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik}}{\sum \text{Badan Publik}} \times 100\%$ <p><u>Penjelasan :</u> 1. Badan Publik mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022, yang dalam hal ini adalah perangkat daerah dan lembaga/unit teknis dibawahnya. 2. Memenuhi standar ...</p>	Laporan Hasil monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Pengelolaan Komunikasi Publik
3.	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Persentase Data statistik sektoral yang berkualitas	$f(x) = \frac{\sum \text{Data statistik sektoral yang berkualitas}}{\sum \text{Data statistik sektoral}} \times 100\%$ <p><u>Penjelasan :</u> Data Statistik sektoral yang berkualitas adalah data yang memenuhi prinsip Satu Data yang tercantum pada Peraturan</p>	Laporan hasil evaluasi daftar data	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik

			Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yaitu : 1. Memenuhi Standar Data 2. Memiliki Metadata 3. Memenuhi kaidah Interoperabilitas Data 4. Menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk		
4.	Meningkatnya Manajemen Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi	$f(x) = \frac{\sum \text{Nilai per Area Keamanan Informasi} \times 100\%}{\sum \text{Area Penilaian}}$ <p><u>Penjelasan :</u> Indeks KAMI mengukur tingkat keamanan informasi pemerintah daerah, dengan menilai 6 (enam) area pengamanan informasi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tata kelola keamanan informasi 2. Pengelolaan resiko keamanan informasi 3. Kerangka kerja keamanan informasi 4. Pengelolaan aset informasi 5. Teknologi dan keamanan informasi 6. Pelindungan Data Pribadi 	Laporan Penilaian Indeks KAMI	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
5.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Dinas Kominfo	<u>Hasil penilaian SAKIP Perangkat Daerah</u>	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo
Tujuan	: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik berbasis integrasi TIK Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif
Indikator Tujuan	: Indeks Pelayanan Publik Nilai SAKIP
Tugas	: Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Fungsi	: 1. perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 2. pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 4. pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk memiliki KTP-el	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP-el}}{\text{Jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP-el}} \times 100\%$ <p>Keterangan : Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP-el = jumlah penduduk usia 17 Th ke atas/ telah menikah yang memiliki KTP-el jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP-el = jumlah penduduk usia 17 tahun keatas/telah menikah </p>	Laporan Cakupan Pelayanan Kependudukan dan pencatatan Sipil	Kabid Pendaftaran Penduduk
		Persentase penduduk memiliki akta kelahiran usia 0-18 tahun	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0 – 18 tahun yang memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumlah anak usia 0 – 18 tahun}} \times 100\%$	Laporan Cakupan Pelayanan Kependudukan dan pencatatan Sipil	Kabid Pencatatan Sipil
2.	Meningkatnya Kualitas Sistem Informasi dan Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Penyajian Data Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang valid	$\frac{\text{Jumlah data kependudukan dan pencatatan sipil yang valid}}{\text{Jumlah data kependudukan dan pencatatan sipil}} \times 100\%$ <p>Keterangan : Data Kependudukan Berupa data agregat meliputi Jumlah Penduduk (berdasar Jenis kelamin, Usia,Agama, Jenis pekerjaan, Pendidikan , Kepemilikan KTP, Akta) </p>	Laporan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

	Persentase Permintaan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditindaklanjuti	<p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah permintaan data kependudukan dan pencatatan sipil yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah permintaan data kependudukan dan pencatatan sipil}} \times 100\%$ </p> <p>Keterangan : Data Kependudukan Berupa data agregat meliputi Jumlah Penduduk (berdasar Jenis kelamin, Usia,Agama, Jenis pekerjaan, Pendidikan , Kepemilikan KTP, Akta)</p>	Dokumen permintaan data kependudukan dan pencatatan sipil	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
3.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Dispendukcapil	Nilai SAKIP pada Dispendukcapil	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Probolinggo
Tujuan	: Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia
Indikator Tujuan	: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Tugas	: Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan
Fungsi	<ol style="list-style-type: none">: 1. Perumusan kebijakan daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan4. Pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan dan5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan	Persentase Peningkatan Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan	$\frac{\text{Jumlah Pengunjung Tahun (n)} - \text{Jumlah Pengunjung Tahun (n-1)}}{\text{Jumlah Pengunjung Tahun (n-1)}} \times 100\%$	Laporan data	Kepala Bidang : ➤ Perpustakaan ➤ Pembinaan dan Pemasyarakatan Perpustakaan dan Kearsipan
2.	Meningkatnya pengelolaan kearsipan daerah	Persentase Peningkatan Perangkat Daerah Yang Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Baku	$\frac{\text{Jumlah PD yang telah menerapkan arsip secara baku Tahun (n)} - \text{Jumlah PD yang telah menerapkan arsip secara baku Tahun (n-1)}}{\text{Jumlah PD yang telah menerapkan arsip secara baku Tahun (n-1)}} \times 100\%$	Laporan data	Kepala Bidang : ➤ Kearsipan ➤ Pembinaan dan Pemasyarakatan Perpustakaan dan Kearsipan
3.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Disperpusip	Nilai SAKIP pada Disperpusip	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Instansi** : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
- Tujuan** : 1. Meningkatkan Produktifitas Sektor Pertanian
2. Meningkatkan Produksi Sektor Perikanan;
3. Meningkatkan Kemandirian dan Ketahanan Pangan Daerah;
4. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif
- Indikator Tujuan** : 1. NTP (Nilai Tukar Petani)
2. NTN (Nilai Tukar Nelayan)
3. Indeks Ketahanan Pangan
4. Nilai SAKIP
- Tugas** : Membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan
- Fungsi** : 1. Perumusan kebijakan Daerah di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Daerah di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Daerah di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Hasil Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian	$\frac{\text{Produktivitas Pertanian Tahun } n - \text{Produktivitas Pertanian Tahun } (n-1)}{\text{Produktivitas Pertanian Tahun } (n-1)} \times 100$ <p>Keterangan :</p> <p>a) Produktivitas Pertanian Tahun n = Produktivitas Pertanian Tahun Berjalan (Kuintal/Hektar)</p> <p>b) Produktivitas Pertanian Tahun (n-1) = Produktivitas Pertanian Tahun Sebelumnya (Kuintal/Hektar)</p> <p>c) Produktivitas Pertanian adalah suatu nilai yang menunjukkan rata-rata hasil produksi per satuan luas per komoditi tanaman</p>	Laporan Hasil Survey Ubinan Komoditas Pertanian	Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.		Persentase Peningkatan Nilai Tambah	$\frac{\text{Nilai Tambah Produk Hasil Pertanian Tahun } n - \text{Nilai Tambah Produk Hasil Pertanian Tahun } (n-1)}{\text{Nilai Tambah Produk Hasil Pertanian Tahun } (n-1)} \times 100$	Laporan Hasil Survey Nilai Tambah Produk Hasil Pertanian	- Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan

	Produk Hasil Pertanian	Keterangan : a) Nilai Tambah Produk Hasil Pertanian Tahun n = Nilai Tambah Produk Hasil Pertanian Tahun Berjalan (Rp./Kg) b) Nilai Tambah Produk Hasil Pertanian Tahun (n-1) = Nilai Tambah Produk Hasil Pertanian Tahun Sebelumnya (Rp./Kg) c) Nilai tambah produk hasil pertanian adalah selisih nilai produk hasil pertanian yang telah melalui proses pengolahan dengan produk hasil pertanian segar	kepada Pelaku Usaha	Perkebunan -Kepala Bidang Peternakan
3	Persentase Penurunan Penyakit Hewan Menular Strategis	$\frac{\text{Jumlah Kasus PHMS pada tahun (n-1)} - \text{Jumlah Kasus PHMS pada tahun n}}{\text{Jumlah Kasus PHMS pada tahun (n-1)}} \times 100$ Keterangan : a) Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis pada tahun n = Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis pada tahun berjalan (ekor) b) Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis pada tahun (n-1) = Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis pada tahun sebelumnya (ekor) c) PHMS = Penyakit Hewan Menular Strategis	Laporan iSIKHNAS (Integrated Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional/Sistem Kesehatan Hewan Nasional Terpadu)	Kepala Bidang Peternakan

4	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	$\frac{\text{Produksi Perikanan Tahun } n - \text{Produksi Perikanan Tahun } (n-1)}{\text{Produksi Perikanan Tahun } (n-1)} \times 100$ <p>Keterangan :</p> <p>a) Produksi Perikanan Tahun n = Produksi Perikanan tangkap dan Produksi Perikanan budidaya Tahun Berjalan (ton)</p> <p>b) Produksi Perikanan Tahun (n-1) = Produksi Perikanan tangkap dan Produksi Perikanan budidaya Tahun Sebelumnya (ton)</p> <p>c) Produksi Perikanan adalah suatu nilai yang menunjukkan seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dalam kurun waktu tertentu</p>	Laporan Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Pengembangan Hasil Perikanan - Kepala Bidang Perikanan Budidaya
5	Meningkatnya Produksi dan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan	$\frac{\text{Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan Tahun } n - \text{Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan Tahun } (n-1)}{\text{Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan Tahun } (n-1)} \times 100$ <p>Keterangan :</p> <p>a) Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan Tahun n = Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan Tahun Berjalan (Rp./Kg)</p> <p>b) Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan Tahun (n-1) = Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan Tahun Sebelumnya (Rp./Kg)</p> <p>c) Nilai tambah produk hasil perikanan adalah selisih nilai produk hasil perikanan yang telah melalui proses pengolahan dengan produk hasil perikanan segar</p>	Laporan Hasil Pendataan Produksi kepada Pengolah Hasil Perikanan	Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Pengembangan Hasil Perikanan
6	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	$\frac{It}{Ib} \times 100$ <p>Keterangan :</p> <p>a) It = Indeks yang diterima oleh pembudidaya ikan</p> <p>b) Ib = Indeks yang dibayar/dikeluarkan oleh pembudidaya ikan</p>	Laporan hasil survei NTPi	Kepala Bidang Perikanan Budidaya

7	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Konsumsi Pangan	Skor PPH Konsumsi	$f(x) = \sum (\% \text{ AKE tingkat konsumsi} \times \text{bobot masing-masing kelompok pangan})$ Keterangan : Jumlah Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) Tingkat Konsumsi dikalikan bobot masing-masing kelompok pangan	Data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional)	Kepala Bidang Ketahanan Pangan
8		Skor PPH Ketersediaan	$f(x) = \sum (\% \text{ AKE tingkat ketersediaan} \times \text{bobot masing-masing kelompok pangan})$ Keterangan : Jumlah Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) Tingkat Ketersediaan dikalikan bobot masing-masing kelompok pangan	Data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional)	Kepala Bidang Ketahanan Pangan
9	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada DKPPP	Nilai SAKIP pada DKPPP	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Instansi : Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Kota Probolinggo
- Tujuan : Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah
- Indikator : 1. PDRB Sektor Perdagangan
- Tujuan : 2. Rasio Kewirausahaan
- Tugas : Membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan di Daerah di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro dan Perdagangan
- Fungsi : a. Perumusan kebijakan daerah di Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil dan Perdagangan; dan Perindustrian
b. Pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil dan Perdagangan; dan Perindustrian
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil dan Perdagangan; dan Perindustrian
d. Pelaksanaan administrasi dinas daerah di Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil dan Perdagangan dan Perindustrian dan;
e. Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Sehat}}{\text{Jumlah Koperasi Aktif}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <p>Koperasi berkualitas adalah Koperasi yang memiliki kinerja aktif dalam bidang kelembagaan, kinerja usaha meningkat dan keuangan sehat serta partisipasi anggota yang kuat.</p> <p>Koperasi Sehat adalah koperasi yang mampu memberikan pelayanan kepada anggotanya serta memenuhi kewajiban sesuai AD/ART, memenuhi kualifikasi yang baik dalam aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan jati diri.</p>	Data Keragaan Koperasi	Bidang Koperasi
2.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Usaha Mikro	Persentase Pelaku Usaha Mikro Yang Mandiri	$\frac{\text{Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang Mandiri}}{\text{Jumlah Pelaku Usaha Mikro}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <p>Aspek Usaha Mikro Yang Mandiri adalah Aspek Legalitas Usaha, Aspek Keuangan (Laporan Keuangan Terpisah), Aspek Pasar (Sebaran Pemasaran mencapai Tingkat Kota),</p>	Data UMKM	Bidang Usaha Mikro

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Aspek Pelaku Usaha yang kompeten (Jumlah peserta pelatihan dengan predikat baik)		
3.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	Peningkatan Nilai Perdagangan	Nilai Perdagangan tahun (n) – Nilai Perdagangan tahun (n-1)	Data Perdagangan	Bidang Perdagangan
4.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Bappedalitbang	Nilai SAKIP pada Bappedalitbang	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Instansi : Dinas Lingkungan Hidup
- Tujuan : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
- Indikator Tujuan : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
- Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Lingkungan Hidup
- Fungsi : 1. Perumusan kebijakan daerah dibidang Lingkungan Hidup;
2. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Lingkungan hidup;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Lingkungan Hidup;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Lingkungan Hidup; dan
5. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air (IKA)	$IKA \text{ Kab./Kota} = \frac{\sum_i^n IKA \text{ Titik Pantau}_i}{Jumlah Titik Pantau}$ $IKA \text{ Titik Pantau} = \sum_i^n w_i l_i$ <p>dimana,</p> <p>W : Faktor pembobot</p> <p> : Sub-indeks</p>	Surat dari Kementerian LH tentang Hasil Nilai IKLH Kabupaten/ Kota	1. Kepala Bidang Tata dan Penaatan Lingkungan (TAPEN) 2. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan 3. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kemitraan Lingkungan (P2KLH)
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Perumusan IKU dengan parameter SO_2 , NO_2 , dan $PM_{2,5}$ menjadi sebagai berikut: $IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,99} (I_{INA} - 0,01) \right)$ $I_{INA} = Rata - rata Indeks NO_2 + Indeks SO_2 + Indeks PM_{2,5}$ $Indeks NO_2 = \frac{Rata - rata NO_2}{Baku Mutu INA}$ $Indeks SO_2 = \frac{Rata - rata SO_2}{Baku Mutu INA}$ $Indeks PM_{2,5} = \frac{Rata - rata PM_{2,5}}{Baku Mutu INA}$	Surat dari Kementerian LH tentang Hasil Nilai IKLH Kabupaten/ Kota	1. Kepala Bidang Tata dan Penaatan Lingkungan (TAPEN) 2. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan 3. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kemitraan Lingkungan (P2KLH)

2.	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah Terkelola	<p>Persentase Sampah Tertangani</p> $\frac{\sum \text{Penanganan Sampah} + \sum \text{Pengurangan Sampah}}{\sum \text{Timbulan Sampah}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <p>Timbulan Sampah : L/orang atau unit/hari Kota Kecil : 2,5 L/org/hari</p>	Laporan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Persampahan di SIPSN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Penanggulangan dan Penanganan Sampah (P2S) 2. Kepala UPTD Pengolahan Sampah (PS)
3.	Meningkatnya Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	$IKL = IKTL + \text{Faktor Koreksi Gambut}$ $IKTL = 100 - [84,3 - (TL \times 100)] \times \frac{50}{54,3}$ $TL = \frac{\sum_{i=1}^{23} (\text{Luas Kelas Tutupan } i \times C_i)}{\sum_{i=1}^{23} (\text{Luas Kelas Tutupan } i)}$ <p>dimana,</p> <p>TL : Tutupan lahan</p> <p>C : Koefisien kelas tutupan lahan</p>	Surat Kementerian LH tentang Hasil Nilai IKLH Kabupaten/ Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Konservasi dan Pertamanan 2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kemitraan Lingkungan (P2KLH) 3. Kepala UPTD Informasi Pendidikan Lingkungan Hidup (IPLH)
3.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada DLH	Nilai SAKIP pada DLH	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo
Tujuan	: 1. Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri 2. Meningkatnya cakupan perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial masyarakat
Indikator Tujuan	: 1. Nilai Produksi Sektor Industri 2. Persentase PMKS
Tugas	Melaksanakan tugas di bidang Perencanaan dan pembangunan industri, pengendalian izin usaha Industri Daerah, pengelolaan sistem informasi industri nasional, perencanaan tenaga kerja, pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, perencanaan kawasan transmigrasi, pembangunan kawasan transmigrasi, pengembangan kawasan transmigrasi
Fungsi	: 1. Perencanaan dan pembangunan industri, meliputi penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri daerah 2. Pengendalian izin usaha Industri Daerah, meliputi Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Daerah; 3. Pengelolaan sistem informasi industri nasional, meliputi Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Daerah; 4. Perencanaan tenaga kerja, meliputi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK); 5. Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, meliputi : pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja

dan pengukuran produktivitas tingkat Daerah.

6. Penempatan tenaga kerja, meliputi : pelayanan antar Kerja di Daerah, penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam

1(Satu) Daerah, pengelolaan Informasi Pasar Kerja, perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah; dan penerbitan Perpanjangan IMTA yang

Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah.

7. Hubungan industrial meliputi : pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi

dalam 1 (satu) Daerah; dan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah.

8. Perencanaan kawasan transmigrasi, meliputi pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi;

9. Pembangunan kawasan transmigrasi, meliputi penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah; dan

10. Pengembangan kawasan transmigrasi, meliputi pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	<u>Nilai Produksi Sektor Industri tahun (n) – Nilai Produksi Sektor Industri tahun (n-1)</u> $\times 100\%$ <p>Nilai Produksi Sektor Industri tahun (n-1)</p> <p>Penjelasan :</p> <p>Nilai produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari proses produksi, dihitung berdasarkan banyaknya produksi dan harga per unit produksi. Produk yang dinilai mencakup produk yang dijual, disimpan sebagai stok, digunakan sendiri, dan yang diberikan kepada pihak lain (Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 850 Tahun 2023 tentang Standar Data Statistik Nasional : halaman 396).</p>	Data Industri	Bidang Perindustrian
2.	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja pada sektor Formal dan Informal	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan pada sektor Formal dan Informal	$\frac{\sum \text{Pencari Kerja yang Ditempatkan pada Sektor Formal dan Informal}}{\sum \text{Pencari Kerja yang Terdaftar}} \times 100\%$	Dokumen Data Ketenagakerjaan	Bidang Penempatan, Perluasan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
3.	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Persentase perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja}}{\text{Jumlah total perusahaan}} \times 100\%$ <p>Ket:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja adalah perusahaan yang mempunyai PP/PKB/PKWT/SP/SP/LKS Bipartit! Jumlah total perusahaan adalah jumlah seluruh perusahaan di Kota Probolinggo 	Data Peraturan Perusahaan Perjanjian Kerja Bersama	Bidang Hubungan Industrial

		Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	$\frac{(\text{Jumlah kasus perselisihan hub industrial tahun n}) - (\text{Jumlah kasus perselisihan hub industrial tahun n-1})}{\text{Jumlah kasus perselisihan hub industrial tahun n-1}} \times 100\%$ <p><u>Ket:</u> Kasus perselisihan hubungan industrial adalah kasus perselisihan hubungan industrial yang selesai dengan perjanjian bersama ataupun anjuran</p>	Data perjanjian bersama dan anjuran	Bidang Hubungan Industrial
4.	Menimngkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP pada Disperinaker	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Disperinaker	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo
Tujuan	: Meningkatnya Nilai Investasi Daerah Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik berbasis integrasi TIK
Indikator Tujuan	: Persentase Pertumbuhan Penanaman Modal Nilai SAKIP Indeks Pelayanan Publik
Tugas	: Membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
Fungsi	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja;2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja;3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja;4. Pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja; dan5. Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Nilai penanaman modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	<p>Nilai Pertumbuhan Investasi</p> $\frac{\text{Nilai Investasi tahun } n - \text{Nilai Investasi tahun } (n-1)}{\text{Nilai Investasi tahun } n} \times 100\%$ <p>Keterangan : Nilai investasi sesuai kegiatan penanaman modal</p>	LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	Kepala Dinas
2	Meningkatnya KInerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP pada DPMPTSP	Nilai SAKIP pada DPMPTSP	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris
3	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	Indeks Kepuasan Masyarakat pada DPMPTSP	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Laporan SKM	Kepala Dinas

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tujuan	Meningkatnya pemerataan dan pemantapan infrastruktur perkotaan
Indikator Tujuan	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase Ketersediaan Infrastruktur2. Persentase Infrastruktur Berkualitas Baik
Tugas	: Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Fungsi	<ol style="list-style-type: none">a. perumusan kebijakan daerah dibidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;d. pelaksanaan administrasi dinas daerah dibidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman; dane. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkan cakupan rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum perpipaan dan memiliki akses sanitasi aman	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Perpipaan	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> $\frac{\text{Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Perpipaan}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$ </div>	Laporan Standar Pelayanan Minimal	Kepala Bidang Cipta Karya
2.	Meningkatkan cakupan rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$ </div>	Laporan Standar Pelayanan Minimal	Kepala Bidang Cipta Karya
3.	Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> $\frac{\text{Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Mantap}}{\text{Panjang Jalan dan Jembatan Kota}} \times 100\%$ </div> <p>Penjelasan : Panjang Jalan dalam Kondisi mantap adalah kondisi dimana kondisi jalan dengan tingkat kerusakan tidak lebih dari 60% dan tingkat kerusakan jalan tidak ada lubang dengan kedalaman lebih dari 20 cm</p>	Data teknis jalan kota	Kepala Bidang Bina Marga
4.	Meningkatkan Pemanfaatan Penataan Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> $\frac{\text{Luas Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW}}{\text{Luas Wilayah Kota}} \times 100\%$ </div>	Siwastek (Sistem Pengawasan Teknis) Penataan Ruang	Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

	Kota Sesuai RTRW				
5.	Meningkatkan kualitas infrastruktur sumber daya air	Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik	$\frac{\text{Panjang Irigasi Dalam Kondisi Baik}}{\text{Panjang Irigasi Kota}} \times 100\%$	Laporan Monitoring dan Evaluasi Sumber Daya Air	Kepala Bidang Sumber Daya Air
6.	Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Persentase penurunan luasan permukiman kumuh	$\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh Awal} - \text{Luas Kawasan Kumuh Akhir}}{\text{Luas Kawasan Kumuh Awal}} \times 100\%$ Penjelasan : <ul style="list-style-type: none"> - Luas Kawasan Kumuh Awal: Luas kawasan kumuh sebelum intervensi (dalam hektar) berdasarkan SK Wali Kota Penetapan Kawasan Kumuh Tahun 2020 - Luas Kawasan Kumuh Akhir: Luas kawasan kumuh setelah intervensi (dalam hektar) 	Berppedoman pada Indikator Kinerja Urusan sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2007	Kepala Bidang Perumahan Kawasan Permukiman
7.		Persentase penyelesaian sengketa	$\frac{\text{Jumlah Sengketa yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sengketa yang Terdaftar}} \times 100\%$	Berppedoman pada Indikator Kinerja Urusan sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2007	Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan
8.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai SAKIP pada Dinas PUPR Perkim	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

	pada Dinas PUPR Perkim			
--	---------------------------	--	--	--

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo
Tujuan	: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik berbasis integrasi TIK
Indikator Tujuan	: 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kecamatan Kademangan 2. Nilai SAKIP
Tugas	: 1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; 2. Menyelenggarakan pelayanan publik; 3. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 4. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 5. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Wali Kota; 6. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; 7. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; 8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan; 9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; 10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan 11. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Fungsi	: Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kademangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Dokumen SKM	Kepala Seksi Pelayanan
					Kepala Seksi Pemerintahan
					Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
					Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Kecamatan Kademangan	Nilai SAKIP pada Kecamatan Kademangan	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo
Tujuan	: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik berbasis integrasi TIK
Indikator Tujuan	: 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kecamatan Kanigaran 2. Nilai SAKIP
Tugas	: 1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; 2. Menyelenggarakan pelayanan publik; 3. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 4. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 5. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Wali Kota; 6. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; 7. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; 8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan; 9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; 10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan 11. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Fungsi	: Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kanigaran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Dokumen SKM	Kepala Seksi Pelayanan
					Kepala Seksi Pemerintahan
					Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
					Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Kecamatan Kanigaran	Nilai SAKIP pada Kecamatan Kanigaran	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo
Tujuan	: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik berbasis integrasi TIK
Indikator Tujuan	: 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kecamatan Kedopok 2. Nilai SAKIP
Tugas	: 1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; 2. Menyelenggarakan pelayanan publik; 3. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 4. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 5. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Wali Kota; 6. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; 7. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; 8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan; 9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; 10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan 11. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Fungsi	: Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kedopok	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Dokumen SKM	Kepala Seksi Pelayanan
					Kepala Seksi Pemerintahan
					Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
					Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Kecamatan Kedopok	Nilai SAKIP pada Kecamatan Kedopok	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo
Tujuan	: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik berbasis integrasi TIK
Indikator Tujuan	: 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kecamatan Mayangan 2. Nilai SAKIP
Tugas	: 1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; 2. Menyelenggarakan pelayanan publik; 3. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 4. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 5. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Wali Kota; 6. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; 7. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; 8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan; 9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; 10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan 11. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Fungsi	: Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Mayangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Dokumen SKM	Kepala Seksi Pelayanan
					Kepala Seksi Pemerintahan
					Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
					Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Kecamatan Mayangan	Nilai SAKIP pada Kecamatan Mayangan	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo
Tujuan	: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik berbasis integrasi TIK
Indikator Tujuan	: 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kecamatan Wonoasih 2. Nilai SAKIP
Tugas	: 1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; 2. Menyelenggarakan pelayanan publik; 3. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 4. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 5. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Wali Kota; 6. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; 7. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; 8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan; 9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; 10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan 11. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Fungsi	: Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Wonoasih	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Dokumen SKM	Kepala Seksi Pelayanan
					Kepala Seksi Pemerintahan
					Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
					Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Kecamatan Wonoasih	Nilai SAKIP pada Kecamatan Wonoasih	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

M. TAUFIK KURNIAWAN